

Strategi Membangun Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan Bela Negara Bagi Para Generasi Muda

*Strategies for Designing a National Defense Education and Training Curriculum for the
Young Generation*

Abd. Syukur

abdsyukur0570@gmail.com

Universitas Pertahanan

Abstract. *This study is motivated by the importance of developing an effective curriculum for national defense education and training among Indonesia's young generation. In accordance with Law No. 20 of 2003 on the National Education System, education is expected to instill national values and strengthen the character of the nation's future leaders. The purpose of this research is to identify appropriate strategies for constructing a national defense curriculum that can reinforce nationalism, enhance mental and physical readiness, and foster awareness of citizens' rights and obligations. The research method employed is a literature study with a descriptive-analytic approach by examining various academic sources, including previous studies on character education, the Pancasila Student Profile, and the dynamics of national defense awareness among youth. The findings indicate that effective strategies include: (1) integrating the values of Pancasila and national insight into the curriculum; (2) strengthening the understanding of citizens' rights and obligations; (3) enhancing self-defense skills and first-aid competencies; and (4) fostering synergy between formal and non-formal educational institutions. These findings emphasize the need for consistent policy support, adequate budget allocation, and extensive public campaigns to broaden participation in national defense education*

Keywords: *Curriculum, National Defense, Young Generation, Nationalism, Character Education*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan bela negara yang efektif bagi generasi muda Indonesia. Sesuai amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan harus berperan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan membentuk karakter generasi penerus bangsa. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi yang tepat dalam membangun kurikulum bela negara sehingga dapat memperkuat nasionalisme, meningkatkan kesiapan mental dan fisik,

serta menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analisis melalui penelaahan berbagai sumber akademik, termasuk hasil penelitian terdahulu mengenai pendidikan karakter, profil Pelajar Pancasila, serta dinamika kesadaran bela negara di kalangan generasi muda. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi yang efektif mencakup: (1) integrasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kurikulum; (2) penguatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara; (3) peningkatan kemampuan bela diri dan keterampilan pertolongan pertama; serta (4) sinergi antara lembaga pendidikan formal dan non-formal. Temuan ini menegaskan perlunya dukungan kebijakan yang konsisten, alokasi anggaran yang memadai, serta kampanye masif untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan bela negara.

Kata kunci: Kurikulum, Bela Negara, Generasi Muda, Nasionalisme, Pendidikan Karakter.

1. Pendahuluan

Generasi muda merupakan tulang punggung bangsa sekaligus harapan dalam memajukan serta membela negara. Namun, kenyataannya tidak semua generasi muda memiliki pemahaman dan kesadaran yang kuat terhadap nilai-nilai bela negara (Sari, Maria, & Franz, 2019, p. 11). Fenomena lunturnya semangat bela negara tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain globalisasi, penetrasi budaya asing, meningkatnya individualisme, serta rendahnya pemahaman akan pentingnya cinta tanah air (Ratri & Najicha, 2022, p. 27).

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya bela negara (Puslatpur, Palilingan, & Wewengkang, 2023, p. 74). Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan realitas. Beberapa kendala utama yang teridentifikasi adalah: (1) kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya terimplementasi; (2) keterbatasan anggaran dan sumber daya; (3) minimnya partisipasi generasi muda dalam program

bela negara; serta (4) lemahnya koordinasi antara lembaga pendidikan formal dan non-formal (Sagala, Sinaga, Purba, & Yunita, 2024, p. 16).

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan strategi komprehensif dalam pembangunan kurikulum bela negara. Upaya strategis yang dapat dilakukan antara lain: penguatan komitmen pemerintah pusat dan daerah, peningkatan alokasi anggaran, kampanye dan sosialisasi masif, serta pengembangan kurikulum bela negara yang terintegrasi lintas lembaga pendidikan (Iskandar, Rosmana, Apriliyani, & Pratammy, 2022, p. 59; Ratri & Najicha, 2022, p. 32). Dengan demikian, kurikulum bela negara tidak hanya menanamkan nilai nasionalisme, tetapi juga membentuk kesiapan mental, fisik, serta keterampilan praktis generasi muda.

Idealnya, kurikulum pendidikan bela negara memuat empat komponen utama: (1) integrasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan; (2) pemahaman hak dan kewajiban warga negara; (3) penguatan kemampuan bela diri dan keterampilan pertolongan pertama; serta (4) sinergi antara lembaga pendidikan formal dan non-formal (Rachmawati, Marini, Nafiah, & Nurasih, 2022, p. 88). Dalam penerapannya, tentu terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, strategi implementasi yang tepat harus memperhatikan sinergi antarlembaga, dukungan kebijakan yang konsisten, serta peningkatan peran serta masyarakat melalui kampanye bela negara (Muradi & Rusli, 2013, p. 193).

Dengan adanya kurikulum bela negara yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan generasi muda Indonesia mampu memperkuat pemahaman nilai Pancasila, menumbuhkan semangat nasionalisme, serta memiliki kesiapan menghadapi tantangan global. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara di Rumpin, Bogor, dapat dijadikan contoh model pengembangan program komprehensif yang mengintegrasikan peran pendidikan formal dan non-formal sesuai kebutuhan di lapangan (Uly, Harsono, Supriyatno, & Gultom, 2023, p. 7510; Darwanto & Nova, 2020, p. 45).

2. Tinjauan Pustaka

Pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila memiliki peran strategis dalam membangkitkan jiwa nasionalisme generasi muda di tengah arus globalisasi. Penelitian Ratri dan Najicha (2022, p. 27) menunjukkan bahwa penanaman nilai Pancasila melalui kurikulum pendidikan kewarganegaraan terbukti efektif dalam meningkatkan semangat cinta tanah air dan kesetiaan pada negara. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi nilai ideologi bangsa ke dalam kurikulum, terutama di tengah tantangan global yang berpotensi melemahkan identitas nasional.

Selain nilai Pancasila, penguatan wawasan kebangsaan juga menjadi aspek kunci dalam membangun kurikulum bela negara. Kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara merupakan fondasi penting agar generasi muda siap membela negara. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam upaya bela negara (Puslatpur, Palilingan, & Wewengkang, 2023, p. 76).

Di sisi lain, aspek keterampilan praktis seperti bela diri dan pertolongan pertama tidak kalah penting. Puslatpur et al. (2023, p. 79) serta Sagala, Sinaga, Purba, dan Yunita (2024, p. 19) menekankan bahwa penguasaan kemampuan bela diri dan keterampilan pertolongan pertama berkontribusi pada kesiapan mental dan fisik generasi muda menghadapi ancaman maupun situasi darurat.

Kurikulum bela negara yang komprehensif juga menuntut adanya sinergi antara pendidikan formal dan non-formal. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan (Agustang, Mutiara, & Asrifan, 2021, p. 41). Dengan demikian, keterlibatan sekolah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, maupun lembaga militer perlu dikolaborasikan untuk memperkuat efektivitas kurikulum bela negara.

Berdasarkan sintesis literatur di atas, terdapat fokus utama dalam membangun kurikulum bela negara bagi generasi muda, yakni: (1) penanaman nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme (Sulaeman & Ariyana, 2018, p. 20); (2) penguatan wawasan kebangsaan dan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara (Ratri & Najicha, 2022, p. 30); (3) peningkatan pengetahuan dan keterampilan bela diri serta pertolongan pertama sesuai kebutuhan lapangan (Sagala et al., 2024, p. 22); dan (4) sinergi antara lembaga pendidikan formal dan non-formal dalam implementasi kurikulum (Rachmawati, Marini, Nafiah, & Nurasiah, 2022, p. 91).

Meski berbagai studi telah mengungkap peran penting nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, serta keterampilan praktis, masih terdapat celah penelitian terkait model kurikulum bela negara yang dapat diadaptasi secara nasional dengan mempertimbangkan konteks lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan diri sebagai upaya untuk menyusun kerangka konseptual dan strategi implementasi kurikulum bela negara yang komprehensif, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan generasi muda Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan mengidentifikasi strategi dalam membangun kurikulum pendidikan dan pelatihan bela negara bagi generasi muda Indonesia. Pemilihan desain studi literatur didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji secara komprehensif teori, konsep, dan praktik dari berbagai sumber akademik serta dokumen kebijakan yang relevan.

Sumber data yang digunakan meliputi:

- a. Buku yang membahas teori pendidikan, kurikulum, dan bela negara.
- b. Artikel ilmiah dan jurnal terakreditasi yang menyoroti isu nasionalisme, pendidikan karakter, serta strategi pertahanan non-militer.

- c. Laporan penelitian terdahulu yang menelaah dinamika kesadaran bela negara di kalangan generasi muda.
- d. Dokumen resmi pemerintah, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, melalui tahapan berikut:

- a. Identifikasi sumber pustaka yang relevan berdasarkan topik penelitian.
- b. Klasifikasi berdasarkan kategori (teori, praktik, kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu).
- c. Analisis isi terhadap dokumen, artikel, dan laporan untuk menemukan konsep, gagasan, dan praktik yang dapat diintegrasikan ke dalam kerangka strategi kurikulum bela negara.

Analisis data dilakukan secara tematik dan interpretatif. Proses ini mencakup:

- a. Reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Kategorisasi tema berdasarkan empat aspek utama kurikulum bela negara, yakni integrasi nilai Pancasila, penguatan wawasan kebangsaan, pengembangan keterampilan bela diri dan pertolongan pertama, serta sinergi pendidikan formal dan non-formal.
- c. Analisis kritis terhadap pola, kelebihan, dan kelemahan strategi yang ditemukan pada literatur.
- d. Sintesis berbagai temuan untuk membangun kerangka konseptual strategi kurikulum bela negara yang komprehensif.

Untuk meningkatkan validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil dari berbagai jenis literatur (buku, jurnal, laporan, dan dokumen kebijakan). Dengan demikian, keandalan data dapat ditingkatkan dan bias analisis dapat diminimalkan.

Hasil analisis tidak hanya mendeskripsikan strategi, tetapi juga menginterpretasikan implikasinya terhadap pembentukan kurikulum bela negara yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menghasilkan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan, sekaligus kontribusi teoretis dalam pengembangan studi pendidikan bela negara di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi empat strategi utama yang dapat diterapkan dalam membangun kurikulum pendidikan dan pelatihan bela negara bagi generasi muda Indonesia. Temuan ini diperoleh melalui analisis komparatif terhadap berbagai sumber, mulai dari regulasi pemerintah, teori pendidikan, hingga hasil penelitian terdahulu yang relevan. Secara konseptual, strategi-strategi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pedagogis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk karakter kebangsaan, memperkuat ketahanan nasional, serta menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan global.

Keempat strategi yang ditemukan ini memiliki keterkaitan erat antara dimensi ideologis, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimensi ideologis menekankan pada penginternalisasian nilai-nilai Pancasila; dimensi kognitif terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan dan pemahaman hak serta kewajiban warga negara; dimensi afektif tercermin dalam pembentukan sikap nasionalisme dan kesediaan membela negara; sedangkan dimensi psikomotorik diwujudkan melalui penguasaan keterampilan bela diri dan pertolongan pertama.

Dengan kata lain, strategi-strategi yang dihasilkan dari penelitian ini berfungsi sebagai kerangka komprehensif yang menyatukan antara nilai dasar bangsa, kesadaran kewarganegaraan, keterampilan praktis, dan sinergi kelembagaan. Apabila diimplementasikan secara terpadu, keempat aspek ini diyakini mampu menghasilkan generasi muda yang tidak hanya memahami pentingnya bela negara

secara konseptual, tetapi juga siap menerapkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, strategi yang dipaparkan berikut ini disusun secara tematik agar dapat menggambarkan secara lebih jelas hubungan antara teori, praktik, serta implikasi kebijakan yang relevan dengan pembangunan kurikulum bela negara di Indonesia.

a. Penanaman nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme

Nilai Pancasila merupakan fondasi ideologis bangsa sekaligus pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi roh dari setiap penyelenggaraan pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal. Penanaman nilai Pancasila bukan sekadar proses kognitif melalui hafalan sila-sila, tetapi sebuah proses internalisasi yang menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Upaya penguatan nilai Pancasila di tingkat pendidikan formal dapat diwujudkan melalui beberapa pendekatan. Pertama, memperkuat mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah dasar hingga menengah dengan metode pembelajaran partisipatif, seperti diskusi studi kasus kebangsaan, simulasi musyawarah, dan problem-based learning. Kedua, pada jenjang perguruan tinggi, integrasi nilai Pancasila dapat dilakukan dalam kurikulum lintas disiplin, misalnya melalui mata kuliah umum, modul etika profesional, atau program pengabdian masyarakat berbasis kebangsaan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam bidang keilmuan masing-masing.

Kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi media penting dalam menanamkan semangat nasionalisme. Kegiatan pramuka, upacara bendera, lomba kebudayaan, serta pelatihan kepemimpinan pemuda dapat

menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Pada ranah non-formal, peran organisasi masyarakat, lembaga kepemudaan, dan komunitas kebangsaan juga sangat signifikan. Program seperti penyuluhan bela negara, kampanye nasionalisme, dan pelatihan kepemudaan terbukti efektif memperluas jangkauan internalisasi nilai Pancasila, khususnya bagi generasi muda yang mungkin kurang terjangkau oleh pendidikan formal (Puslatpur, Palilingan, & Wewengkang, 2023, p. 74; Diputera, Yus, Sipahutar, & Sinaga, 2023, p. 31).

Penanaman nilai Pancasila juga perlu diarahkan pada pembentukan karakter yang sesuai dengan lima sila, seperti religiositas, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan sosial. Proses ini sejalan dengan konsep *character building* yang menempatkan pendidikan sebagai sarana utama mencetak generasi berintegritas tinggi, berjiwa patriotik, dan memiliki kesadaran bela negara yang kuat.

Nilai Pancasila tidak hanya dipelajari secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sosial generasi muda melalui tindakan nyata, baik dalam konteks sekolah, masyarakat, maupun aktivitas digital. Integrasi nilai ini secara konsisten diharapkan mampu membentuk generasi yang berkarakter nasionalis, moderat, dan adaptif terhadap tantangan global tanpa kehilangan identitas kebangsaannya.

b. Penguatan wawasan kebangsaan dan kesadaran hak-kewajiban warga negara

Wawasan kebangsaan merupakan modal utama dalam membangun generasi muda yang memiliki identitas nasional yang kuat. Dalam konteks bela negara, wawasan kebangsaan tidak hanya bermakna pengetahuan tentang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga kesadaran akan posisi strategis Indonesia dalam geopolitik global, pentingnya menjaga persatuan, serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan

wawasan yang memadai, generasi muda tidak sekadar menjadi penonton, tetapi berperan aktif sebagai pelaku dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Pada pendidikan formal, penguatan wawasan kebangsaan dapat dilakukan melalui kurikulum yang memuat materi sejarah nasional, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan peran Indonesia di kancah internasional. Mata pelajaran seperti PPKn, Sejarah Indonesia, dan Sosiologi menjadi ruang utama untuk menanamkan pemahaman tersebut. Pembelajaran hendaknya dikemas dengan metode inovatif, misalnya *project-based learning*, *case study*, atau simulasi sidang kenegaraan sehingga siswa tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga mengasah keterampilan berpikir kritis dan partisipasi aktif.

Pada pendidikan non-formal, wawasan kebangsaan dapat diperkuat melalui pelatihan kepemudaan, dialog kebangsaan, maupun kegiatan organisasi masyarakat. Program seperti seminar bela negara, diskusi tematik tentang isu aktual, serta kemah kebangsaan mampu memperluas cakrawala generasi muda dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam keberagaman. Penelitian Rambe, Ramadhani, dan Akmala (n.d., p. 18) menunjukkan bahwa kegiatan diskusi dan seminar berbasis isu nyata efektif dalam meningkatkan kesadaran bela negara, karena mendorong peserta untuk merefleksikan langsung perannya sebagai warga negara.

Dari sisi dimensi kognitif, penguatan wawasan kebangsaan meliputi pemahaman hak dan kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Generasi muda perlu memahami bahwa hak untuk memperoleh pendidikan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hukum selalu beriringan dengan kewajiban untuk menaati hukum, membayar pajak, serta ikut serta dalam upaya bela negara (Ratri & Najicha, 2022, p. 29).

Sementara pada dimensi afektif, penguatan wawasan kebangsaan bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air, kebanggaan terhadap identitas nasional, serta kesediaan untuk berkorban demi bangsa. Hal ini dapat diwujudkan melalui kegiatan reflektif, seperti menonton film sejarah, melakukan ziarah ke makam pahlawan, atau mengikuti program pertukaran pelajar yang menekankan persatuan dalam keberagaman.

Dari perspektif kebijakan, penguatan wawasan kebangsaan membutuhkan peran aktif pemerintah dalam menyediakan kurikulum yang adaptif, dukungan anggaran untuk program pendidikan kebangsaan, serta regulasi yang mendorong sinergi antara sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan. Tanpa dukungan kebijakan yang konsisten, wawasan kebangsaan berpotensi hanya menjadi pengetahuan kognitif semata tanpa diinternalisasi dalam perilaku generasi muda.

Penguatan wawasan kebangsaan dan kesadaran hak-kewajiban warga negara merupakan salah satu strategi vital dalam membangun kurikulum bela negara. Melalui sinergi antara pendidikan formal dan non-formal, serta dukungan kebijakan yang konsisten, diharapkan generasi muda Indonesia tumbuh sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, dan siap berkontribusi dalam menjaga kedaulatan serta persatuan bangsa.

c. Peningkatan keterampilan bela diri dan pertolongan pertama

Aspek praktis dari kurikulum bela negara tidak hanya menekankan pada pemahaman ideologis, tetapi juga pada keterampilan yang dapat langsung diaplikasikan di lapangan. Dua keterampilan penting yang perlu dikuatkan adalah kemampuan bela diri dan pertolongan pertama. Kedua aspek ini tidak hanya mendukung kesiapan fisik generasi muda, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, serta kepedulian sosial dalam menghadapi berbagai ancaman dan kondisi darurat.

Pada pendidikan formal, keterampilan bela diri dapat diintegrasikan melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) serta kegiatan ekstrakurikuler seperti pencak silat, taekwondo, atau karate. Latihan bela diri melatih aspek psikomotorik, seperti kekuatan, ketahanan, dan kelincahan, sekaligus menumbuhkan kedisiplinan, kontrol diri, serta sikap sportif. Sementara itu, keterampilan pertolongan pertama dapat dimasukkan dalam modul kesehatan sekolah atau pelatihan Palang Merah Remaja (PMR). Dengan cara ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan kognitif, tetapi juga mampu mempraktikkan prosedur pertolongan dasar seperti resusitasi jantung paru (RJP), perawatan luka, hingga evakuasi darurat.

Dalam pendidikan non-formal, peningkatan keterampilan bela diri dan pertolongan pertama dapat diperoleh melalui organisasi kepemudaan, komunitas bela diri, maupun lembaga pelatihan khusus. Kegiatan seperti latihan bela negara, kemah kebangsaan, serta program tanggap bencana memungkinkan generasi muda untuk menguji keterampilan dalam situasi simulasi nyata. Penelitian Sagala, Sinaga, Purba, dan Yunita (2024, p. 21) menegaskan bahwa generasi muda yang terlatih dalam bela diri dan pertolongan pertama memiliki tingkat kesiapan mental yang lebih tinggi dalam menghadapi krisis maupun ancaman terhadap keamanan diri dan lingkungan.

Dari perspektif dimensi kognitif, keterampilan ini menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya kesiapsiagaan individu dan kolektif. Generasi muda belajar bahwa bela negara tidak selalu identik dengan perang atau konflik bersenjata, tetapi juga mencakup kesiapan menghadapi bencana alam, krisis kesehatan, maupun ancaman non-militer lainnya. Pada dimensi psikomotorik, latihan bela diri dan pertolongan pertama

membentuk refleks tanggap darurat, kemampuan fisik, serta keterampilan praktis yang dapat menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.

Dari sisi kebijakan, peningkatan keterampilan ini membutuhkan dukungan regulasi dan program pemerintah. Misalnya, kerja sama antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, dan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menyediakan modul pelatihan bela diri dasar dan pertolongan pertama di sekolah-sekolah. Program ini dapat diperkuat melalui kerjasama dengan TNI, Basarnas, maupun BNPB dalam bentuk pelatihan lapangan dan simulasi bencana.

Peningkatan keterampilan bela diri dan pertolongan pertama memiliki nilai strategis ganda: pertama, memperkuat ketahanan individu dalam menjaga keselamatan diri dan lingkungannya; kedua, menumbuhkan solidaritas sosial dalam membantu sesama pada kondisi darurat. Integrasi aspek ini ke dalam kurikulum bela negara akan menghasilkan generasi muda yang tidak hanya nasionalis secara ideologis, tetapi juga siap secara fisik dan mental menghadapi tantangan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

d. Sinergi antara lembaga pendidikan formal dan non-formal

Salah satu strategi kunci dalam membangun kurikulum bela negara yang komprehensif adalah terwujudnya sinergi antara lembaga pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal memiliki keunggulan dalam memberikan pengetahuan teoretis, sistematis, dan berjenjang, sementara pendidikan non-formal cenderung lebih fleksibel dan aplikatif dalam melatih keterampilan praktis, kedisiplinan, serta kepemimpinan. Apabila kedua jalur pendidikan ini berjalan sendiri-sendiri, maka implementasi kurikulum bela negara akan bersifat parsial. Namun, apabila keduanya dikolaborasikan, maka akan terbentuk model kurikulum yang utuh, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan bangsa.

Pada ranah pendidikan formal, sekolah dan perguruan tinggi dapat mengintegrasikan kurikulum bela negara ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Sejarah, Pendidikan Jasmani, maupun kegiatan kokurikuler seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik bela negara. Di sisi lain, pada jenjang pendidikan tinggi, mahasiswa dapat diarahkan untuk melakukan program pengabdian masyarakat berbasis kebangsaan, misalnya pelatihan literasi ideologi Pancasila di desa, penyuluhan hukum, atau program kewirausahaan yang mendukung kemandirian nasional.

Sementara itu, pada ranah pendidikan non-formal, organisasi kepemudaan, komunitas bela diri, karang taruna, pramuka, dan lembaga kemasyarakatan memiliki peran besar dalam memperkuat aspek praktis bela negara. Melalui kegiatan kemah kebangsaan, pelatihan pertolongan pertama, latihan dasar kepemimpinan, maupun simulasi tanggap bencana, generasi muda dapat mengasah keterampilan fisik, kepedulian sosial, dan ketahanan mental. Temuan Resmi (2021, p. 100) dan Rachmawati, Marini, Nafiah, & Nurashiah (2022, p. 90) menegaskan bahwa tanpa koordinasi yang solid antar-lembaga, kurikulum bela negara sulit mencapai efektivitas karena keterlibatan masyarakat akan terbatas pada ruang-ruang tertentu saja.

Dari perspektif kebijakan, sinergi formal dan non-formal membutuhkan regulasi yang menekankan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan perlu mendorong MoU antar-lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan instansi terkait. Selain itu, dukungan anggaran perlu diarahkan bukan hanya untuk sekolah formal, tetapi juga untuk mendukung kegiatan kepemudaan dan komunitas yang menjadi basis pendidikan non-formal.

Secara praktis, sinergi ini dapat diimplementasikan melalui:

- *Program joint training* antara sekolah dan lembaga militer/non-militer.
- Pengembangan kurikulum kolaboratif yang menyeimbangkan teori dan praktik.
- Penyediaan pusat pelatihan bela negara di daerah strategis seperti Rumpin, Bogor, yang menjadi contoh model integrasi pendidikan formal dan non-formal.
- Pembentukan forum koordinasi kebangsaan di tingkat daerah yang melibatkan guru, dosen, aparat militer, pemuda, serta masyarakat sipil.

Dengan adanya sinergi ini, generasi muda akan mendapatkan pengalaman belajar yang holistik: pemahaman ideologis yang kuat dari pendidikan formal sekaligus keterampilan praktis dari pendidikan non-formal. Hasil akhirnya adalah terbentuknya generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara fisik, disiplin, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Sinergi ini juga akan memastikan bahwa kurikulum bela negara relevan dengan kebutuhan riil bangsa, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika tantangan global.

Diskusi Kritis dan Implikasi

Keempat strategi di atas saling melengkapi dan membentuk kerangka kurikulum bela negara yang komprehensif. Nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan memberikan basis ideologis dan konseptual, sementara keterampilan praktis serta sinergi kelembagaan memastikan implementasi yang realistis dan berkesinambungan. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya dukungan kebijakan pendidikan nasional yang konsisten, penyediaan anggaran memadai, serta pelaksanaan kampanye bela negara secara masif untuk meningkatkan partisipasi generasi muda.

Secara akademis, hasil ini memperkaya literatur mengenai pendidikan bela negara dengan menegaskan perlunya kombinasi pendekatan ideologis, kognitif,

dan praktis. Sementara secara praktis, temuan ini dapat dijadikan dasar bagi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan untuk mengembangkan model kurikulum terpadu yang dapat diuji coba di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara seperti yang ada di Rumpin, Bogor.

Keterbatasan dan Arah Penelitian Lanjutan

Kajian ini masih berbasis pada studi literatur sehingga tidak mencakup data empiris langsung dari implementasi kurikulum bela negara di lapangan. Penelitian lanjutan dengan metode campuran (*mixed methods*) atau studi kasus di berbagai daerah sangat diperlukan untuk menguji efektivitas model strategi yang diusulkan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi longitudinal untuk menilai keberlanjutan dampak kurikulum bela negara terhadap pembentukan karakter dan kesadaran bela negara generasi muda.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi dalam membangun kurikulum pendidikan dan pelatihan bela negara yang komprehensif bagi generasi muda Indonesia. Berdasarkan kajian literatur, ditemukan empat strategi utama yang saling melengkapi, yaitu: (a) penanaman nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme, (b) penguatan wawasan kebangsaan dan kesadaran hak-kewajiban warga negara, (c) peningkatan keterampilan bela diri dan pertolongan pertama, serta (d) sinergi antara lembaga pendidikan formal dan non-formal.

Keempat strategi tersebut menjawab pertanyaan penelitian dan selaras dengan tujuan awal studi, yakni merumuskan kerangka kurikulum bela negara yang tidak hanya ideologis, tetapi juga aplikatif. Penelitian ini menegaskan bahwa kurikulum bela negara perlu didesain secara integratif, mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga mampu mencetak generasi muda yang nasionalis, tangguh, disiplin, dan peduli terhadap bangsa. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada sintesis literatur yang menghubungkan teori pendidikan karakter, konsep bela

negara, dan praktik kebijakan. Adapun kontribusi praktisnya adalah memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam merumuskan kurikulum bela negara yang adaptif terhadap tantangan global dan relevan dengan konteks lokal.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

- a. Bagi pembuat kebijakan, perlu memperkuat regulasi dan alokasi anggaran untuk mendukung pengembangan kurikulum bela negara secara terpadu, termasuk kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, organisasi kepemudaan, dan lembaga masyarakat.
- b. Bagi lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, penting untuk mengimplementasikan kurikulum bela negara melalui metode pembelajaran yang inovatif, kolaboratif, dan berbasis pengalaman langsung, agar nilai-nilai kebangsaan dapat diinternalisasi secara efektif.
- c. Bagi masyarakat dan generasi muda, partisipasi aktif dalam program-program bela negara perlu ditingkatkan, baik melalui kegiatan sekolah, kampus, maupun komunitas sosial, sehingga terbentuk kesadaran kolektif dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian empiris dengan pendekatan kuantitatif maupun studi kasus lapangan guna menguji efektivitas model kurikulum bela negara yang telah dirumuskan. Penelitian longitudinal juga diperlukan untuk mengevaluasi keberlanjutan dampak pendidikan bela negara terhadap karakter generasi muda.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi pengembangan kurikulum bela negara sebagai langkah strategis dalam membangun ketahanan nasional yang berakar pada nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, serta keterampilan praktis yang relevan dengan dinamika zaman.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Anderson, B. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (Rev. ed.). Verso.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan RI.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Rineka Cipta.

2. Jurnal

- Alnashr, M. S. (2018). Integrasi pendidikan siaga bencana dalam kurikulum madrasah ibtidaiyah. *Magistra: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman*, 6(2), 155–168. <https://doi.org/10.31942/mgs.v6i2.1779>
- Darwanto, D., & Nova, S. (2020). Pengintegrasian soft skills pada setiap pembelajaran. *Eksponen*, 10(2), 42–55. <https://doi.org/10.47637/eksponen.v10i2.295>
- Diputera, A. M., Yus, A., Sipahutar, R. J., & Sinaga, R. (2023). Konstruksi indikator asesmen dimensi profil pelajar Pancasila fase pendidikan anak usia dini. *Jurnal Bunga Rumpai Usia Emas*, 9(1), 29–40. <https://doi.org/10.24114/jbrue.v9i1.47897>
- Iskandar, S., Rosmana, P. S., Apriliyani, A., & Pratammy, S. D. (2022). Upaya peningkatan kualitas siswa pada Kurikulum 2013. *Attadib Journal of Elementary Education*, 6(1), 55–65. <https://doi.org/10.32507/attadib.v6i1.1227>
- Muradi, M., & Rusli, Z. (2013). Akuntabilitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 1(2), 189–198. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JAP/article/view/1357>
- Peter, R., & Simatupang, M. S. (2022). Keberagaman bahasa dan budaya sebagai kekayaan bangsa Indonesia. *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 9(1), 96–108. <https://doi.org/10.33541/dia.v9i1.4028>

- Puslatpur, P., Palilingan, T. N., & Wewengkang, F. S. (2023). Kedudukan dan fungsi komponen cadangan dalam memperkuat sistem pertahanan negara ditinjau dari UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 13(2), 150–167.*
- Rachmawati, N., Marini, A., Nafiah, M., & Nurasih, I. (2022). Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam implementasi kurikulum prototipe di sekolah penggerak jenjang sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 45–60.*
- Ratri, E. P., & Najicha, F. U. (2022). Urgensi Pancasila dalam menanamkan jiwa nasionalisme pada generasi muda di era globalisasi. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 25–40.
<https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7455>
- Resmi, A. C. (2021). Penerapan model problem-based learning dalam pembelajaran daring untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 2(3), 97–108. <https://doi.org/10.22219/jppg.v2i3.14479>
- Sagala, V., Sinaga, S., Purba, K., & Yunita, S. (2024). Dinamika kesadaran masyarakat khususnya generasi muda akan pertahanan dan semangat bela negara demi terwujudnya tujuan nasional Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(1), 12–29.*
- Sari, E. P., Maria, E., & Franz, A. (2019). Sistem pakar bimbingan dan konseling terhadap perilaku siswa menggunakan metode backward chaining berbasis web. *Buletin Poltanesa*, 20(1), 11–20. <https://doi.org/10.51967/tanesa.v20i1.313>
- Setiawan, R., & Hidayat, A. (2020). Pendidikan karakter dalam konteks bela negara. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 215–227. <https://doi.org/10.21831/jpk.v10i2.32840>
- Sulaeman, A., & Ariyana, A. (2018). Pengaruh penggunaan model pembelajaran examples non-examples terhadap hasil belajar menulis teks berita pada siswa kelas VIII SMPN 14 Kota Tangerang. *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia Daerah dan Asing*, 1(2), 17–27.
<https://doi.org/10.31540/silamparibisa.v1i2.201>

- Sulianti, A., Arifin, S., & Sakdiyah, H. (2021). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan moral melalui pembelajaran demokrasi. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.36412/ce.v4i2.2367>
- Uly, H. J. M., Harsono, G., Supriyatno, M., & Gultom, R. A. (2023). Strategi pertahanan negara dalam mengamankan wilayah perbatasan di Indonesia (Studi kasus perbatasan Indonesia-RDTL). *Journal on Education*, 5(3), 7508–7521. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1543>
- Wuryandani, W., Fathurrohman, F., & Supriyanto, T. (2018). Implementasi pendidikan bela negara di perguruan tinggi. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), 158–174. <https://doi.org/10.22146/jkn.37821>

3. Media Online

- Agustang, A., Mutiara, I. A., & Asrifan, A. (2021). Masalah pendidikan di Indonesia. *Open Science Framework*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9xs4h>
- Rambe, R., Ramadhani, G., & Akmala, T. F. (2021). Peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. *Musyitari: Neraca Manajemen dan Ekonomi*, 3(3), 210–225.*

4. Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/UU_tahun2003_nomor020.pdf